

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI SOLUSI KONFLIK SARA

Husnu Maab

Abstrak:

Bangsa Indonesia dikenal sebagai Bangsa-Negara yang fluralistik dalam berbagai aspek, baik agama, suku, bahasa, etnis, budaya dan adat istiadat. Kemajmukan ini di satu sisi menjadi hal yang sangat baik, namun disisi lain menjadi rawan konflik khorizental, terutama konflik antar agama. Dalam kondisi yang demikian, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang bisa dijadikan lihat djembatan solusif bagi harmni. Pendidikan multikulturalisme yang ahir-ahir ini marak diperbincangkan diharapkan bisa menjadi jembatan solusif untuk harmoni tersebut. Hal ini terrlihat dari fungsi dan tujuan dari pendidikan multikulturalisme tersebut yang mengedepankan sikap demokratis, toleran dan keadilan. Dengan sikap yang demikian, maka konflik SARA diharapkan bisa dipreventifikasi.

Keyword: *Pendidikan, Multikulturalisme, Konflik, Sara*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan budaya, agama, ras, suku, bahasa dan adat istiadat. Keragaman yang ada, sesungguhnya dapat menjadi salah satu potensi besar bagi kemajuan. Namun di lain pihak, juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan terutama konflik horizontal, tentunya apabila tidak dikelola dan dibina dengan baik. Pendidikan multikulturalisme sangat penting untuk diupayakan demi mencapai stabilitas social dan harmoni dalam keragaman, atau bhineka Tunggal Ika menjadi penting sebagai watak dari pendidikan multikulturalisme., Uapaya kearah harmoni ini telah diupayakan pemerintah, hal ini terbukti secara implisit dalam salah satu fokus dari Pasal 4 Undang-undang N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab III yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya) dan kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar Negara, yakni Pancasila. Melalui dasar yuridis ini, maka pelaksanaan pendidikan

agama juga perlu memperhatikan aspek-aspek demokratis, keadilan, HAM, nilai-nilai atau norma (*values*) serta pengakuan terhadap aspek keragaman.

Pengakuan terhadap segala bentuk keragaman tentu saja tidak cukup, karena itu diperlukan upaya untuk menyikap keragaman dengan perlakuan yang berlandaskan pada asas keadilan. Inilah yang menjadi muatan atau target dari pendidikan multikultural. Sehingga pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai suatu konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbhineka ras, etnik, kelas sosial, agama dan kelompok budaya.¹

Terkait dengan itu pula, maka pendidikan agama harus masuk sebagai bagian dari bentuk pendidikan multikulturalisme, dalam artian bahwa agama dengan ajaran moralnya harus mendapatkan perhatian dari pendidikan yang berbasis multikultural ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Muslim Abdurrahman bahwa dengan melibatkan pertimbangan aagama dalam berbagai bidang, maka agama akan mampu berperan secara maksimal, tidak lagi menanamkan kesalehan ritual, tapi lebih dari itu, yakni mewujudkan kesalehan sosial yang mampu membongkar proses dehumanisasi.²

Pembahasan mengenai multi kulturalisme mengharuskan juga pembahasan mengenai berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, seperti demokrasi, globalisasi, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip etik.³ Sejatinya dalam beberapa dekade belakangan ini, gagasan yang berupaya mengakomodasi dan menata aspek keragaman melalui agenda pendidikan cukup banyak dilakukan. Tidak sedikit pula ide-ide bermunculan terkait multikulturalisme yang teraktualisasi dalam wacana pendidikan. Hanya saja jika dilihat dari proses pengembangan serta aspek implementasinya, masih belum berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan pendidikan multikultural masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Sebagai wacana yang relatif baru, hal ini tentu saja bisa dimaklumi. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dan berbagai persoalan yang ada di lapangan, kebutuhan akan implementasi yang tepat dan terarah, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.

¹ Hj. Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, (Malang: UIN-MALIK PRESS (Anggota IKAPI), 20012), h. 48.

² Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 74-135.

³ Hj. Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, h. 3.

Persoalan-persoalan yang muncul setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yakni: *Pertama*, aspek kuantitatif, pendidikan multikultural masih belum tersosialisasi dengan baik dan belum berpengaruh luas terhadap masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Walaupun di tingkat perguruan tinggi wacana multikulturalisme sudah cukup mendapat tempat, namun di tingkat sekolah (menengah) khususnya yang berada di daerah-sekolah umum, madrasah maupun pesantren, spirit dan nilai-nilai multikulturalisme belum tersosialisasi secara luas. Begitupun dengan pemahaman masyarakat terkait pentingnya multikulturalisme, secara umum dapat dikatakan masih sangat sempit. Menurut Hj. Sulalah, hal ini disebabkan oleh kurangnya wadah atau tidak terwadahi dalam ruang diskusi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kurang yakin dan seringkali memunculkan kontroversi dalam merumuskan seputar paham multikulturalisme. Yang paling menonjol adalah sebagian dari ummat Isla.⁴

Kedua, aspek kualitatif, baik dari sisi konsep maupun implementasinya masih banyak bagian yang *perlu* dibenahi. Secara konsep, pendidikan multikultural kurang tersistematisasi dengan baik, terutama untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya referensi hasil pemikiran yang secara rinci menjelaskan bentuk-bentuk implementasi pendidikan multikultural, sehingga berdampak pada usaha-usaha praktis yang akan dilakukan. Begitupula dalam proses pembelajaran, terutama di tingkat sekolah menengah, multikulturalisme belum terintegrasi secara jelas di dalam kurikulum, baik sebagai materi tersendiri, pokok bahasan atau materi sisipan. Kondisi ini ditambah pula dengan persoalan tenaga pendidik yang sebagian besar belum memahami dengan baik mengenai konsep multikulturalisme yang berimplikasi pada proses internalisasi dalam pembelajaran.

Mencermati fenomena yang demikian, maka upaya pengembangan pendidikan multikulturalisme sangat perlu dilakukan untuk lebih memperluas dan mengefektifkan pelaksanaan pendidikan yang mengakomodasi segala bentuk dinamika keragaman dan perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimungkinkan, mengingat lembaga pendidikan merupakan sentral untuk melahirkan individu yang terdidik dan humanis. Sehingga begitu mereka terjun dan berbaur dengan masyarakat, mereka bisa menjadi agen perdamaian dalam perbedaan.

⁴ Hj. Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, h. 4.

Definisi Pendidikan Multikultural

Terdapat dua kata dalam istilah Pendidikan Multikultural, yakni pendidikan dan Multikultural. Karena itu kedua kata ini perlu dijelaskan. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen- dan akhiran-an yang berarti proses, perbuatan, cara mendidik, pelihara dan ajar.⁵ Istilah pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan *tarbiyah* yang berarti pendidikan.⁶ Dalam konteks Islam, istilah pendidikan kadang kala digunakan dengan kata *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. *Tarbiyah* dengan kata dasarnya *rabba* yang berarti mendidik, membesarkan, mengasuh, berkembang dan meningkat (tumbuh).⁷ Kata *tarbiyah* khususnya dalam al-Qur'an menunjuk pada masa anak-anak dan berkaitan dengan usaha yang wajib dilakukan, dan merupakan beban orang-orang dewasa terutama orang tua terhadap anaknya.⁸

Zakiah Daradjat mengartikan pendidikan dengan suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam menyampaikan pelajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan kepribadian peserta didik.⁹ Pendidikan jika ditinjau dari segi terminologis juga mempunyai banyak pengertian. Di antaranya seperti yang diungkap oleh Crow dan Crow, pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan membantunya meneruskan kebiasaan-kebiasaan generasi.¹⁰ Dalam *Ensiklopedi Pendidikan*, istilah pendidikan diartikan dengan semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya,

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 204; Agus Basri, *Pendidikan Islam sebagai Penggerak Pembaharuan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1984), h. 19.

⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 1; Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 25.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. III (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 138; Munjid, (Beirut: Dar el-Machreq, 1986), h. 247; Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam; Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Penerjemah Haidar Bagir. cet. VII (Bandung: Mizan, 1996), h. 72

⁸ Maksum, *Madrasah, Sejarah, dan Perkembangannya*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 16

⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 27; Bandingkan; Mohamad Ali, "Reorientasi Makna Pendidikan: Urgensi Pendidikan Terpadu," dalam Marzuki Wahid, dkk., ed., *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 171.

¹⁰ Zahara Indris dan Lisna Jamal, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jilid I (Jakarta: Grasindo, 1992).

pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniyah.¹¹

Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian utama.²⁹ Dalam terminologi yang berbeda, Ramayulis mendefinisikan pendidikan sebagai segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Sedangkan Zuhairini mendefinisikan pendidikan dengan aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Sementara itu, M. Arifin mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia (sebagai makhluk pribadi dan sosial), kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.¹²

Dengan kata lain, bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, namun mencakup aspek non-formal.¹³ Secara lebih luas dan Nana Sudjana mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar yang bertujuan dan usaha mendewasakan peserta didik (anak). Kedewasaan ini antara lain mencakup kedewasaan intelektual, sosial, moral, dan tidak semata-mata kedewasaan dalam arti fisik. Pendidikan juga merupakan suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat.¹⁴

Dengan demikian pendidikan merupakan sebuah upaya manusia untuk mengkonstruksi dirinya menjadi lebih baik secara individu dan bermasyarakat, baik sebagai masyarakat agama, masyarakat budaya dan sebagai bagian dari alam. Pendidikan tersebut bias dilaksanakan secara formal maupun non formal. Secara formal dilakukan dengan model

¹¹ Soegarda Poerbakawatja dan A. H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, cet. II (Jakarta: Gunung Agung, 1981), h. 257.

¹² M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 12.

¹³ Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 149.

¹⁴ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, cet. II (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 2.

pendidikan yang terstruktur dalam sebuah lembaga. Secara non formal dilakukan melalui pengalaman hidup, keluarga dan masyarakat.

Secara bahasa, kata pluralis berasal dari bahasa Inggris *plural* yang berarti jamak, dalam arti keanekaragaman dalam masyarakat atau ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Secara istilah pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara substansial termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip oleh Budy Munawar Rahman, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities withi the bond of civility*).

Secara sederhana, ‘multikultural’ dapat berarti ‘keragaman budaya’. Istilah multikultural dibentuk dari kata ‘multi’ yang berarti plural; banyak; atau beragam, dan ‘kultur’ yang berarti budaya. Kultur atau budaya merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetik dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya. Dengan kata lain, kultur merupakan sifat yang “khas” bagi setiap individu (*person*) atau suatu kelompok (*comunitie*) yang sangat mungkin untuk berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak komunitas yang muncul, maka semakin beragam pula masing-masing kultur yang akan dibawa. Dengan demikian multikultural dapat diartikan sebagai faham keberagaman (majemuk) terhadap kultur (adat) yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Keberagaman yang dimaksud di disini adalah keberagaman suku, agama, ras dan adat istiadat.¹⁵

Aspek ‘keragaman’ yang menjadi esensi dari konsep multikultural dan kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang disebut dengan multikulturalisme, merupakan gerakan yang bukan hanya menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan yang ada, tetapi juga bagaimana keragaman atau perbedaan yang ada dapat diperlakukan sama sebagaimana harusnya. Dalam kaitan ini, ada tiga hal pokok yang menjadi aspek mendasar dari multikulturalisme, yakni: *Pertama*, sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama. *Kedua*, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu

¹⁵ H. Samsul Nizar, *sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009), h. Xii,

membutuhkan hal yang *Ketiga*, yaitu pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua elemen sosial-budaya, termasuk juga negara.

Sebenarnya belum terdapat keseragaman diantara para pakar terhadap pengertian pendidikan multikultural. Sunarto, sebagaimana dikutip Haidar, mengemukakan ada tiga macam pengertian pendidikan multicultural, (1) pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat; (2) pendidikan yang menawarkan ragam model dalam keragaman budaya dalam masyarakat; (3) pendidikan yang membentuk sikap siswa untuk menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Sedangkan penulis memilih definisi yang ke-3, yaitu pendidikan yang mampu menumbuhkan sikap menghargai keragaman budaya dalam masyarakat.

Aspek pokok yang sangat ditekankan dalam gerakan multikulturalisme adalah kesediaan menerima dan memperlakukan kelompok lain secara sama dan sebagaimana harusnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Harkat dan martabat manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan entitas budayanya masing-masing (yang bersifat dinamis dan khas), merupakan dimensi yang sangat penting diperhatikan dalam gerakan multikulturalisme. Itulah sebabnya multikultural berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas, karena mereka memiliki budaya masing-masing.¹⁶

Itulah sebabnya, terdapat beberapa faktor yang mendorong semaraknya multikulturalisme, *pertama*, keterbukaan masyarakat yang memiliki kekayaan budayan, modal dan pengalaman sejarah. *Kedua*, banyaknya lembaga pendidikan keagamaan yang membuat kehidupannya lebih dinamis. *Ketiga*, semakin banyaknya industri di daerah, sehingga menjadikan latar belakang budaya yang semakin beragam. *Keempat*, adanya sejumlah lembaga pendidikan yang melahirkan generasi muda militan. *Kelima*, semakin banyaknya daerah yang memiliki pluralitas dari berbagai ras, etnis, agama, budaya dan Bangsa.¹⁷ Dengan demikian pendidikan multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai suatu konsep

¹⁶ Pahrurrozi M. Bukhori, *Membebaskan Agama dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Raziq*, (Jakarta, 2003), 25.

¹⁷ Hj. Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, h. 9-10.

yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbhineka ras, etnik, kelas sosial, agama dan kelompok budaya.¹⁸

Landasan Empirik Pendidikan Multikultural

Secara historis, konsep pendidikan multikulturalisme diawali oleh konsep *intercultural* dan interkelompok. Amerika Serikat seperti yang diungkapkan Azra yang dikutip Dauly diterangkan bahwa pada dasawarsa 1940-1950 berkembang konsep pendidikan *intercultural* dan interkelompok. Pada dasarnya pendidikan ini untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok yang berbeda. Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya.

Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak anasir sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multicultural.

Gerakan multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia sekitar 1970-an, disusul kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Di antara faktor yang melatarbelakangi kemunculan multikulturalisme di negara-negara tersebut adalah

¹⁸ Hj. Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, (Malang: UIN-MALIK PRESS (Anggota IKAPI), 20012), h. 48.

menyangkut persoalan rasisme dan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, terutama yang ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari Afrika (negro).¹⁹

Tahun 1980-an agaknya yang dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang pioner dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana, di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an. Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. *Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri diri pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun

¹⁹ Hj. Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, h. 9

secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara. Dengan demikian pendidikan berperan sebagai proses individuasi, yaitu suatu perpaduan yang menyeluruh dari dinamika individu dan partisipasinya dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Sehingga terdapat kesadaran, bahwa dalam memahami dunia kehidupan selalu dalam konteks dialektika antara dunia individu dan sosiokultural.²⁰

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Setelah beberapa dekade, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting, yaitu: *Pertama*, multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini. *Kedua*, adalah gelombang multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, sehingga berimplikasi pada semakin kokohnya gerakan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari proses sejarah dengan perkembangan yang begitu cepat, menunjukkan bahwa multikulturalisme sebagai sebuah gerakan yang konsern pada aspek-aspek pluralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, merupakan gerakan yang dinilai tepat untuk diposisikan sebagai alternatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan aspek keragaman. Respons positif tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari unsur kebutuhan manusia terhadap adanya suatu konsep yang dapat menata dan menghargai pluralitas dalam kehidupan secara lebih baik dan lebih berarti.

Secara sosial dan kultural, perkembangan kehidupan manusia yang saat ini berada pada fase peradaban global, sudah tentu tidak bisa terhindar dari unsur perbedaan atau keragaman (diversitas). Menurut Bikhu Parekh, perbedaan tersebut setidaknya bisa

²⁰ Lihat Belger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

dikategorikan dalam tiga hal, yakni: *Pertama*, perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. *Kedua*, perbedaan dalam perspektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* (sejati) sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).

Kompleksnya keragaman atau perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia, baik secara sosial maupun kultural merupakan hal yang wajar (alamiah). Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan pernah lepas dari proses interaksi dengan segala komponen yang ada disekitarnya, termasuk dengan sesamanya. Begitupun manusia sebagai makhluk yang berbudaya, maka budaya-budaya yang lahir dari setiap individu maupun komunitas yang ada, selalu akan muncul dengan berbagai bentuknya. Untuk itu, berbagai konflik atau benturan terhadap fakta keragaman dan perbedaan yang ada perlu dikelola dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sebagaimana yang terangkum dalam gerakan multikulturalisme.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, gerakan multikulturalisme yang tereduksi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Dengan jumlah ± 13.000 pulau besar dan kecil serta jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang terdiri atas 300-an suku dengan hampir 200 bahasa yang digunakan, sangat memerlukan konsep penataan yang baik agar tidak terjadi saling benturan. Begitupun dalam aspek keagamaan dan faham kepercayaan, di Indonesia juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan dan aliran keyakinan lainnya. Fakta keragaman ini adalah aspek yang sangat sensitif apabila tidak dikelola dengan baik, terutama untuk kelompok masyarakat akar rumput (*grass root*), yang secara psikologis masih sangat mudah terpancing pada isu-isu yang bernuansa SARA. Konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di masa lalu, diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terulang kembali.

Pendekatan dan Karakteristik Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural harus memiliki pendekatan. Dalam hal ini J. A. Bank menawarkan empat pendekatan, yakni, Kontributif, aditif, aksi sosial dan transformatif. Sementara itu Gay menawarkan empat pendekatan, yakni dekonstruktif, inklusi, infusi, dan transformatif.²¹ Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Pendidikan plural-multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
2. Pendidikan plural-multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
3. Pendidikan plural-multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
4. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.

Pendidikan plural-multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri. Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan
2. Berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian.

²¹ Sebagaimana yang dikutip dalam Hj. Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, h. 128.

3. Mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman budaya.

Setelah kita mengkaji apa dan bagaimana pendidikan multikultural tersebut, maka terlihat bahwa Dari prinsip dan tujuan pendidikan multikultural tersebut, maka dengan diterapkan pendidid multi kultural pada sistem pendidikan nasional, diharapkan akan ada kesadaran dari kalangan terdidik untuk melihat dan memaenkan peran seabagai agen masyarakat yang lebih mengedepankan sikap toleran dan demokratis terhadap perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada adalah hukum kehidupan itu senebdiri. Konflik horizontal yang ada diharapkan bisa diminimalisir bahkan dicegah, sehingga Indonesia tetap utuh sebagai Bangsa yang pluralistik dalam damai.

Kesimpulan

Pendidikan multikulturalisme yang telah diterapkan dalam pendidikan Nasional diharapkan mampu menjadi agen di masyarakat yang menjembatani perdamain ditengah-tengah pluralitas yang ada, hal ini dapat dilihat dari subtansi yang termuat dalam Pendidikan multukulturalisme yang mengedepankan sikap dan prinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan, berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian, Mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman budaya. Dengan fungsi yang demikian maka konflik SARA bisa dipreventifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- al-Attas, Naquib, Muhammad, Sye *Konsep Pendidikan Islam; Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Penerjemah Haidar Bagir. cet. VII (Bandung: Mizan, 1996).
- Ali, Noer, Herry, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999).
- Baidhaw, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Basri, Agus, *Pendidikan Islam sebagai Penggerak Pembaharuan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1984).
- Belger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

- Bukhori, M., Pahrurrozi, *Membebaskan Agama dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Raziq*, (Jakarta, 2003).
- Maksum, *Madrasah, Sejarah, dan Perkembangannya*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)/
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: GayaMuda Pratama, 2005).
- Nizar, Samsul, H., *sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009).
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 1; Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Soegarda Poerbakawatja dan A. H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, cet. II (Jakarta: Gunung Agung, 1981).
- Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, cet. II (Bandung: Sinar Baru, 1991).
- Wahid, Marzuki, dkk., ed., *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. III (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Yunus, Mahmud, *Pendidikan dan Pengajaran*, cet. III (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Zahara Indris dan Lisna Jamal, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jilid I (Jakarta: Grasindo, 1992).
- Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).